

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jeanne Silvia

Pascasarjana Manajemen Universitas Abdul Azis Lamadjido Palu Jl.
DR. Suharso, Besusu Barat, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi
Tengah
Email: rudin.ternate@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah; (1) Mengetahui dan menganalisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah. (2) Mengetahui dan menganalisis Faktor penghambat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah. Kesimpulan penelitian ini yaitu ; (1) Efektivitas pengelolaan anggaran sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang berjalan secara konsisten. Pengelolaan APBD dapat dikatakan efektif apabila alokasi anggaran mampu direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, serta menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan target pembangunan pertanian daerah. (2) Faktor penghambat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa hambatan utama bersumber dari faktor internal dan eksternal. Secara internal, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kualitas data yang belum optimal, koordinasi yang belum maksimal, serta budaya kerja yang masih berorientasi pada penyerapan anggaran menjadi kendala utama. Secara eksternal, keterbatasan fiskal daerah, ketergantungan pada dana transfer pusat, kondisi geografis yang luas dan beragam, risiko bencana alam, serta fluktuasi harga komoditas pertanian turut memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran.

Kata kunci ; Efektivitas, Anggaran, Pendapatan Belanja Daerah.

ABSTRACT

The objectives of this study are: (1) To determine and analyze the effectiveness of Regional Budget (APBD) management at the Food Crops and Horticulture Service of Central Sulawesi Province. (2) To determine and analyze the inhibiting factors in the management of Regional Budget (APBD) at the Food Crops and Horticulture Service of Central Sulawesi Province. The conclusions of this study are: (1) The effectiveness of budget management is largely determined by the quality of planning, accuracy of implementation, and a consistent monitoring and evaluation system. APBD management can be said to be effective if budget allocations are realized on time, on target, and produce outputs and outcomes that align with regional agricultural development targets. (2) The inhibiting factors in the management of Regional Budget (APBD) at the Food Crops and Horticulture Service of Central Sulawesi Province indicate that the main obstacles stem from internal and external factors. Internally, limited human resource capacity, suboptimal data quality, suboptimal coordination, and a work culture that is still oriented towards budget absorption are the main obstacles. Externally, regional fiscal constraints, dependence on central transfer funds, vast and diverse geographic conditions, the risk of natural disasters, and fluctuations in agricultural commodity prices also impact the effectiveness of budget management.

Keywords: Effectiveness, Budget, Regional Revenue and Expenditure.

A. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prinsip otonomi. Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran.¹

¹ Dwiyanto, A. 2006. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.

APBD bukan sekadar dokumen keuangan, melainkan cerminan kebijakan publik yang merepresentasikan prioritas pembangunan daerah. Melalui APBD, pemerintah daerah menentukan arah kebijakan pembangunan, termasuk dalam sektor pertanian yang menjadi salah satu sektor strategis di banyak daerah, termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah. Pengelolaan APBD yang efektif akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan pembangunan, serta kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pengelolaan anggaran yang tidak efektif dapat menimbulkan pemborosan, rendahnya serapan anggaran, ketidaktepatan sasaran program, hingga potensi penyimpangan keuangan daerah.²

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura. Secara geografis dan agroklimatologis, wilayah ini memiliki lahan yang luas serta kondisi alam yang mendukung pengembangan komoditas seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, dan berbagai jenis hortikultura lainnya. Sektor pertanian tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran pada perangkat daerah yang membidangi sektor ini memiliki peran yang sangat strategis.

Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura, Dinas Tanaman Pangan dan

² Ghozali, I. 2018. *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan produksi, produktivitas, serta kesejahteraan petani. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dirancang oleh dinas ini sepenuhnya bergantung pada alokasi dan pengelolaan APBD yang tersedia. Dengan demikian, efektivitas pengelolaan APBD menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sektor pertanian di daerah tersebut.

Efektivitas pengelolaan APBD dapat diukur melalui berbagai indikator, antara lain tingkat serapan anggaran, kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, ketepatan waktu pelaksanaan program, serta pencapaian output dan outcome yang telah ditetapkan. Selain itu, aspek transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana anggaran dikelola secara profesional dan bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pengelolaan APBD sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterlambatan penetapan anggaran, perubahan kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia, serta kendala administratif dan teknis lainnya.³

Dalam konteks sektor tanaman pangan dan hortikultura, efektivitas pengelolaan APBD sangat menentukan keberhasilan program-program seperti penyediaan benih unggul, bantuan sarana produksi, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan, pengembangan kawasan hortikultura, serta peningkatan kapasitas petani melalui penyuluhan dan pelatihan. Apabila pengelolaan anggaran tidak dilakukan secara optimal, maka program-program tersebut berpotensi tidak mencapai target yang telah ditetapkan,

³ Halim, A. 2016. *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Edisi 5). Salemba Empat.

sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas dan pendapatan petani.

Selain itu, dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang menuntut adanya perencanaan dan penganggaran yang adaptif serta berbasis kinerja. Pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*) menekankan keterkaitan antara alokasi anggaran dengan hasil yang ingin dicapai. Dalam hal ini, setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.⁴

Pengelolaan APBD pada tingkat perangkat daerah juga tidak terlepas dari peran pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh inspektorat daerah, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Temuan-temuan hasil pemeriksaan sering kali menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maupun ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah tersedia secara memadai, implementasinya di lapangan masih memerlukan perbaikan dan penguatan.

Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik semakin meningkat. Masyarakat tidak lagi hanya menilai keberhasilan pemerintah dari besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi juga dari dampak nyata yang dirasakan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap

⁴ Handoko, T. H. 2017. *Manajemen* (Edisi 2). BPFE.

efektivitas pengelolaan APBD menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah direncanakan benar-benar digunakan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha hortikultura di Provinsi Sulawesi Tengah.

Penelitian mengenai efektivitas pengelolaan APBD pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah menjadi relevan untuk dilakukan mengingat peran strategis dinas tersebut dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan pertanian daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas tersebut, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan di masa mendatang.⁵

Selain memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu administrasi publik dan manajemen keuangan daerah, penelitian ini juga diharapkan memiliki kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, khususnya bagi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, dalam merumuskan strategi perbaikan pengelolaan anggaran. Dengan pengelolaan APBD yang lebih efektif, diharapkan pembangunan sektor tanaman pangan dan hortikultura dapat berjalan lebih optimal, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

⁵ Hidayat, M. 2022. Peran pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan pelayanan pertanian di Kabupaten Brebes. *Jurnal Manajemen Keuangan Daerah*, 4(1).

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana Faktor penghambat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada sifat keilmuan yaitu, rasional, empiris dan sistimatis. Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian tersebut menggunakan langkah-langkah yang bersifat logis.⁶

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dimana penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu atau mencoba menggambarkan fenomena secara detail (Yusuf, 2014). Penelitian

⁶ Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.

Deskriptif Kuantitatif adalah penelitian yang melakukan pengujian terhadap angka-angka statistik. Dalam penelitian ini dilakukan pengujian efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini dilakukan Pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah yang bertempat di Jalan Kartini Nomor 80 Palu, Penelitian dilaksanakan setelah ujian Proposal dilaksanakan. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah sumber Penerimaan Daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah Waktu penelitian diperkirakan bulan September – Desember tahun 2025.

D. PEMBAHASAN

Sejarah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk sebagai tindak lanjut dari kebijakan penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pangan. Pembentukan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian diperjelas melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 18 Tahun 2016 mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah. Sebelum berdiri sebagai perangkat daerah tersendiri, urusan pangan masih tergabung dan dilaksanakan oleh perangkat daerah lain yang menangani sektor

pertanian dan ketahanan pangan.⁷ Seiring dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan pangan—seperti ketersediaan, distribusi, stabilitas harga, kerawanan pangan, serta keamanan dan konsumsi pangan—maka diperlukan lembaga khusus yang fokus menangani urusan pangan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam mengembangkan sektor pertanian, khususnya dalam bidang tanaman pangan dan hortikultura di wilayah Sulawesi Tengah. Dinas ini memiliki tugas utama untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program-program yang berkaitan dengan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura guna mendukung kesejahteraan masyarakat.

Secara historis, perkembangan sektor pertanian di Sulawesi Tengah telah melalui berbagai fase yang panjang. Pada masa penjajahan Belanda, sektor pertanian di Sulawesi Tengah terutama berfokus pada komoditas ekspor seperti kopi, kakao, dan rempah-rempah lainnya. Namun, setelah Indonesia merdeka, perhatian terhadap sektor pertanian lebih difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan pangan domestik dan peningkatan kesejahteraan petani.⁸

Pada awalnya, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah belum ada sebagai entitas yang terpisah. Kegiatan yang berhubungan dengan pertanian, termasuk tanaman pangan dan hortikultura, dikelola oleh berbagai instansi yang

⁷ Sinambela, L. P. 2008. *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*. Bumi Aksara.

⁸ Mardiasmo. 2018. *Akuntansi sektor publik* (Edisi Revisi). Andi Offset. Sumber fundamental tentang keuangan publik dan APBN

terpisah. Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan untuk memiliki lembaga yang lebih terstruktur dan spesifik dalam menangani sektor pertanian yang lebih luas semakin mendesak.

Pada tahun 2000-an, dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya sektor pertanian dalam menunjang perekonomian dan ketahanan pangan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memutuskan untuk membentuk sebuah dinas yang khusus menangani urusan tanaman pangan dan hortikultura. Dinas ini bertujuan untuk memberikan perhatian khusus terhadap sektor tanaman pangan dan hortikultura yang sangat relevan dengan kebutuhan hidup masyarakat Sulawesi Tengah.

Pada masa awal pembentukan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah lebih berfokus pada peningkatan produksi tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan kacang tanah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penyuluhan kepada petani dan penerapan teknologi pertanian modern. Dinas ini juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga riset pertanian untuk menciptakan varietas unggul yang dapat meningkatkan hasil pertanian.

Pada periode ini, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura juga berperan aktif dalam mendukung pengembangan hortikultura, khususnya komoditas seperti cabai, tomat, bawang merah, dan sayur mayur lainnya. Salah satu fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien, baik dalam hal perawatan tanaman maupun pasca-panen.⁹

Pada tahun 2010-an, sektor hortikultura di Sulawesi Tengah semakin berkembang dengan semakin banyaknya produk

⁹ Moenir, A. S. 2006. *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*. Bumi Aksara.

hortikultura yang diproduksi dan dipasarkan ke luar daerah. Hal ini didorong oleh peningkatan kemampuan para petani dalam menggunakan sistem pertanian organik dan metode pertanian ramah lingkungan yang diperkenalkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dinas ini juga mengadakan berbagai program pelatihan dan pendampingan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas produk mereka.

1. Analisis efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan pelayanan publik dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks sektor pertanian, khususnya tanaman pangan dan hortikultura, pengelolaan APBD memiliki peran strategis karena sektor ini tidak hanya menyangkut ketahanan pangan, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perangkat daerah memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembangunan pertanian berbasis tanaman pangan dan hortikultura. Efektivitas pengelolaan APBD pada dinas ini sangat menentukan keberhasilan peningkatan produksi, produktivitas, kesejahteraan petani, serta stabilitas pasokan pangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.¹⁰

Pembahasan ini akan menguraikan efektivitas pengelolaan APBD pada dinas tersebut dengan meninjau aspek perencanaan,

¹⁰ Musgrave, R. A. 1959. *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill Book Company.

pelaksanaan, pengendalian, akuntabilitas, serta dampaknya terhadap kinerja pembangunan pertanian daerah. Efektivitas dalam pengelolaan APBD dapat dimaknai sebagai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Pengelolaan yang efektif berarti bahwa anggaran yang dialokasikan mampu menghasilkan output dan outcome yang sesuai atau melebihi target yang direncanakan. Dalam sektor tanaman pangan dan hortikultura, indikator efektivitas dapat dilihat dari:

1. Peningkatan luas tanam dan luas panen.
2. Peningkatan produktivitas komoditas utama (padi, jagung, kedelai, sayuran, buah-buahan).
3. Stabilitas harga dan pasokan.
4. Peningkatan pendapatan petani.
5. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani.

Efektivitas juga berkaitan dengan prinsip *value for money*, yaitu ekonomi (hemat), efisiensi (tepat guna), dan efektivitas (tepat sasaran).¹¹

a. Perencanaan Anggaran

Tahap perencanaan merupakan fondasi efektivitas pengelolaan APBD. Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, perencanaan anggaran biasanya mengacu pada dokumen RPJMD, Renstra Dinas, serta kebijakan nasional di bidang pertanian. Perencanaan yang efektif ditandai dengan:

- i. Sinkronisasi antara program pusat dan daerah.
- ii. Keterlibatan pemangku kepentingan, termasuk kelompok tani.

¹¹ Nasution, A. 2021. Analisis efektivitas pengelolaan APBD di organisasi perangkat daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(3).

- iii. Analisis kebutuhan berbasis data (data luas lahan, produksi, hama, irigasi).
- iv. Penetapan indikator kinerja yang terukur.

Dalam praktiknya, efektivitas perencanaan APBD dipengaruhi oleh kualitas data pertanian. Jika data produksi atau luas lahan tidak akurat, maka alokasi anggaran untuk benih, pupuk, atau alat mesin pertanian bisa tidak tepat sasaran.

Di Sulawesi Tengah, kondisi geografis yang beragam—mulai dari wilayah pesisir hingga dataran tinggi—menuntut perencanaan yang berbasis wilayah (spasial). Efektivitas anggaran meningkat ketika program dirancang sesuai karakteristik agroekosistem masing-masing kabupaten/kota.

b. Struktur Belanja dan Prioritas Program

Efektivitas pengelolaan APBD juga dapat dilihat dari komposisi belanja. Pada dinas teknis seperti Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, belanja biasanya terbagi menjadi:

- i. Belanja operasi (gaji, honorarium, perjalanan dinas).
- ii. Belanja barang dan jasa (pengadaan benih, pupuk, pestisida).
- iii. Belanja modal (alat mesin pertanian, pembangunan irigasi tersier, gudang penyimpanan).

Pengelolaan yang efektif mensyaratkan proporsi belanja yang lebih besar diarahkan pada program yang berdampak langsung kepada petani, seperti bantuan sarana produksi dan peningkatan infrastruktur pertanian. Apabila sebagian besar anggaran terserap untuk belanja rutin administratif, maka dampak terhadap peningkatan produksi dan kesejahteraan petani menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, analisis efektivitas perlu melihat

seberapa besar anggaran dialokasikan untuk kegiatan produktif dibandingkan belanja pendukung.¹²

c. Pelaksanaan Program dan Penyerapan Anggaran

Tingkat penyerapan anggaran sering dijadikan indikator kinerja. Namun, penyerapan tinggi tidak selalu identik dengan efektivitas tinggi. Penyerapan yang efektif harus diikuti dengan pencapaian target kinerja. Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, efektivitas pelaksanaan program dapat dilihat dari:

- i. Ketepatan waktu realisasi kegiatan tanam.
- ii. Distribusi bantuan tepat sasaran dan tepat waktu.
- iii. Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan yang berkualitas.
- iv. Pengawasan terhadap penggunaan bantuan.

Kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan antara lain keterlambatan proses pengadaan, perubahan regulasi, kondisi cuaca ekstrem, dan bencana alam. Sulawesi Tengah yang pernah mengalami gempa dan likuefaksi pada 2018 menunjukkan bahwa faktor eksternal sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan anggaran. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di tingkat dinas dan penyuluh pertanian lapangan juga menjadi faktor kunci. Tanpa SDM yang kompeten, anggaran yang besar pun tidak akan menghasilkan output maksimal.¹³

d. Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian internal merupakan bagian penting dalam memastikan efektivitas APBD. Dinas harus memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi (monev) yang sistematis untuk memantau

¹² Oates, W. E. 1972. *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.

¹³ Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. *Journal of Marketing*, 49(4).

capaian program. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi, baik dari sisi fisik maupun keuangan. Misalnya, jika target peningkatan produktivitas padi adalah 5 ton/ha dan realisasi hanya 4 ton/ha, maka perlu dianalisis penyebabnya. Apakah karena kualitas benih, distribusi pupuk, atau faktor iklim. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem e-budgeting dan e-planning, juga meningkatkan transparansi dan akurasi pengelolaan anggaran. Dengan sistem yang terintegrasi, potensi kesalahan administrasi dan penyimpangan dapat diminimalkan.¹⁴

e. Akuntabilitas dan Transparansi

Efektivitas pengelolaan APBD tidak terlepas dari aspek akuntabilitas. Dinas wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah dan masyarakat. Akuntabilitas yang baik tercermin dari:

- i. Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah.
- ii. Minimnya temuan audit terkait pengelolaan anggaran.c
- iii. Publikasi informasi program dan realisasi anggaran secara terbuka.

Transparansi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya petani sebagai penerima manfaat. Ketika proses seleksi penerima bantuan dilakukan secara terbuka, potensi konflik sosial dapat ditekan. Efektivitas pengelolaan APBD pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah pada akhirnya

¹⁴ Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance . from the Perspective of Regional Fiscal Management Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan 3 (13), 1891-1900

diukur dari dampaknya terhadap pembangunan pertanian daerah.

Beberapa dampak yang dapat dianalisis meliputi:

- i. Peningkatan produksi komoditas unggulan.
- ii. Stabilitas ketersediaan pangan daerah.
- iii. Penurunan angka kemiskinan di sektor pertanian.
- iv. Peningkatan daya saing produk hortikultura.

Jika anggaran digunakan secara efektif untuk peningkatan teknologi budidaya, penyediaan benih unggul, dan penguatan akses pasar, maka sektor tanaman pangan dan hortikultura dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah.

Sebaliknya, jika pengelolaan kurang efektif—misalnya bantuan tidak tepat sasaran atau program tidak berkelanjutan—maka dampaknya hanya bersifat jangka pendek dan tidak signifikan. Beberapa tantangan utama dalam pengelolaan APBD di sektor ini antara lain:

- i. Keterbatasan fiskal daerah.
- ii. Ketergantungan pada dana transfer pusat.
- iii. Fluktuasi harga komoditas pertanian.
- iv. Perubahan iklim dan serangan organisme pengganggu tanaman.
- v. Koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

Selain itu, budaya birokrasi yang masih berorientasi pada penyerapan anggaran, bukan pada hasil (outcome), juga menjadi hambatan dalam mewujudkan efektivitas yang sesungguhnya. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD, beberapa strategi dapat dilakukan:

- i. Penguatan perencanaan berbasis data dan teknologi.
- ii. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan penyuluh.
- iii. Penerapan anggaran berbasis kinerja secara konsisten.
- iv. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi.

- v. Pelibatan aktif petani dan kelompok tani dalam perencanaan dan evaluasi program. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, swasta, dan perguruan tinggi juga dapat meningkatkan kualitas program pertanian.¹⁵

Efektivitas pengelolaan APBD pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan pertanian daerah. Efektivitas tidak hanya diukur dari tingginya penyerapan anggaran, tetapi dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan tujuan pembangunan. Perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat waktu dan tepat sasaran, pengendalian yang ketat, serta akuntabilitas yang tinggi menjadi pilar utama dalam mewujudkan pengelolaan APBD yang efektif. Dengan pengelolaan yang baik, sektor tanaman pangan dan hortikultura di Sulawesi Tengah dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Melalui komitmen terhadap prinsip good governance dan penguatan sistem manajemen kinerja, efektivitas pengelolaan APBD akan semakin meningkat, sehingga visi pembangunan pertanian yang maju, mandiri, dan berdaya saing dapat terwujud secara nyata di Provinsi Sulawesi Tengah.

¹⁵ Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat Jurnal Ilmiah. Manajemen\ Kesatuan 13 (5), 3663-3674

2. Analisis Faktor penghambat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam sektor pertanian. Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, pengelolaan APBD memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan tanaman pangan dan hortikultura yang berkelanjutan. Namun dalam praktiknya, terdapat berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas dan optimalisasi pengelolaan anggaran tersebut. Faktor-faktor ini bersifat multidimensional, mencakup aspek internal organisasi maupun faktor eksternal yang berada di luar kendali langsung dinas.¹⁶

Salah satu faktor penghambat utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pengelolaan APBD menuntut kompetensi teknis di bidang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, serta evaluasi berbasis kinerja. Tidak semua aparatur memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai dalam manajemen keuangan daerah. Dalam beberapa kasus, pejabat pengelola keuangan merangkap tugas teknis lainnya, sehingga fokus dan kualitas pengelolaan anggaran menjadi kurang optimal. Keterbatasan kemampuan dalam menyusun indikator kinerja yang terukur juga

¹⁶ Rudin, M, MLF Bakarbesy, F Fadlun, 2024, Strategi Manajemen Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo 10 (1), 186-199

menyebabkan program yang dirancang kurang tajam dalam menjawab kebutuhan riil sektor pertanian.¹⁷

Selain itu, rotasi dan mutasi pegawai yang cukup sering turut memengaruhi kesinambungan pengelolaan anggaran. Ketika pejabat pengelola keuangan atau perencana diganti, proses adaptasi membutuhkan waktu. Hal ini berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan program, terutama jika tidak diikuti dengan sistem dokumentasi dan transfer pengetahuan yang baik. Akibatnya, terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan awal dengan implementasi di lapangan.

Faktor penghambat berikutnya adalah kualitas data pertanian yang belum sepenuhnya akurat dan mutakhir. Perencanaan anggaran yang efektif sangat bergantung pada data luas lahan, produktivitas, jumlah petani, kebutuhan sarana produksi, serta kondisi infrastruktur pertanian. Jika data yang digunakan tidak valid atau belum diperbarui secara berkala, maka alokasi anggaran berisiko tidak tepat sasaran. Misalnya, bantuan benih atau pupuk bisa saja diberikan pada wilayah yang sebenarnya tidak lagi menjadi sentra produksi utama, sementara daerah potensial lainnya kurang mendapatkan dukungan.

Keterbatasan fiskal daerah juga menjadi hambatan signifikan. Struktur APBD provinsi pada umumnya masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ketika terjadi penyesuaian atau pengurangan dana transfer, maka alokasi untuk sektor pertanian bisa terdampak. Kondisi ini menyebabkan program prioritas harus disesuaikan atau bahkan ditunda. Dalam konteks pembangunan tanaman pangan dan hortikultura yang memerlukan kesinambungan, keterbatasan

¹⁷ Rahmawati, S. 2020. Efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Pertanian. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2).

anggaran dapat mengganggu stabilitas program jangka menengah dan panjang.

Ketergantungan terhadap dana pusat juga memengaruhi fleksibilitas perencanaan. Program yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) umumnya telah ditentukan peruntukannya secara spesifik. Hal ini membatasi ruang inovasi daerah dalam merancang kegiatan yang lebih kontekstual sesuai kebutuhan lokal. Akibatnya, terdapat kemungkinan program yang dijalankan kurang sepenuhnya selaras dengan karakteristik wilayah dan permasalahan spesifik petani di Sulawesi Tengah.¹⁸

Proses birokrasi yang panjang dan kompleks turut menjadi faktor penghambat. Mekanisme pengadaan barang dan jasa, pencairan anggaran, serta pelaporan keuangan harus melalui tahapan administrasi yang ketat sesuai regulasi. Meskipun regulasi tersebut bertujuan menjaga akuntabilitas, dalam praktiknya proses yang terlalu panjang dapat menyebabkan keterlambatan realisasi program. Dalam sektor pertanian, waktu sangat krusial karena berkaitan dengan musim tanam. Keterlambatan distribusi benih atau alat mesin pertanian akibat proses administrasi yang berbelit dapat mengakibatkan petani kehilangan momentum musim tanam.

Selain persoalan administratif, koordinasi lintas sektor yang belum optimal juga menjadi hambatan. Pembangunan pertanian tidak dapat berdiri sendiri; ia membutuhkan dukungan infrastruktur irigasi, jalan usaha tani, akses pasar, serta kebijakan perdagangan yang mendukung. Jika koordinasi antara dinas terkait kurang efektif, maka pelaksanaan program yang didanai APBD tidak akan memberikan hasil maksimal. Misalnya,

¹⁸ Rahman, A. 2020. Desentralisasi fiskal dan kualitas pelayanan publik: Studi pada kabupaten di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 9(2).

peningkatan produksi hortikultura tidak akan berdampak signifikan jika akses distribusi ke pasar masih terbatas.

Faktor geografis dan kondisi alam Sulawesi Tengah juga menjadi tantangan tersendiri. Wilayah yang luas dengan topografi beragam—dari pegunungan hingga pesisir—menyulitkan distribusi bantuan dan pengawasan program. Beberapa daerah terpencil sulit dijangkau, sehingga biaya operasional meningkat dan pengendalian kegiatan menjadi kurang optimal. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidaktepatan waktu pelaksanaan program serta kesulitan dalam memonitor penggunaan anggaran secara langsung di lapangan.¹⁹

Risiko bencana alam merupakan faktor eksternal yang tidak dapat diabaikan. Sulawesi Tengah pernah mengalami bencana gempa bumi dan likuefaksi yang berdampak luas terhadap sektor pertanian. Dalam situasi seperti ini, prioritas anggaran sering kali bergeser untuk penanganan darurat dan rehabilitasi. Perubahan prioritas tersebut dapat mengganggu rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Selain itu, kerusakan infrastruktur pertanian akibat bencana juga memerlukan alokasi anggaran tambahan yang tidak selalu tersedia dalam perencanaan awal.

Perubahan regulasi yang cepat juga menjadi hambatan dalam pengelolaan APBD. Kebijakan nasional terkait pengelolaan keuangan daerah, sistem pengadaan, maupun prioritas pembangunan dapat berubah setiap tahun. Aparatur daerah harus menyesuaikan diri dengan regulasi baru dalam waktu singkat. Proses penyesuaian ini tidak jarang menimbulkan kebingungan atau kesalahan administratif yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan anggaran.

¹⁹ Putra, D. 2019. Analisis pengelolaan APBD dan dampaknya terhadap pelayanan infrastruktur di Kota Bandung. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1).

Budaya organisasi yang masih berorientasi pada penyerapan anggaran dibandingkan pencapaian outcome juga menjadi kendala. Dalam beberapa kasus, keberhasilan kinerja lebih diukur dari tinggi rendahnya persentase realisasi anggaran daripada dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Orientasi seperti ini dapat mendorong pelaksanaan kegiatan yang sekadar memenuhi target penyerapan, tanpa evaluasi mendalam terhadap efektivitasnya.

Partisipasi masyarakat yang belum optimal juga memengaruhi kualitas pengelolaan anggaran. Idealnya, kelompok tani dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi program. Namun dalam praktiknya, keterlibatan tersebut kadang masih bersifat formalitas. Akibatnya, program yang dirancang tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil petani. Minimnya partisipasi juga dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dalam distribusi bantuan.

Keterbatasan sistem pengawasan internal turut menjadi faktor penghambat. Meskipun terdapat mekanisme audit dan pengendalian, efektivitasnya sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme aparatur. Jika pengawasan tidak berjalan optimal, potensi penyimpangan atau inefisiensi penggunaan anggaran akan meningkat. Hal ini tentu berdampak pada menurunnya kualitas hasil program.

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah fluktuasi harga komoditas pertanian. Harga yang tidak stabil dapat memengaruhi motivasi petani untuk meningkatkan produksi. Meskipun dinas telah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan produktivitas, hasilnya bisa kurang optimal jika harga jual produk tidak menguntungkan. Kondisi pasar yang tidak

stabil berada di luar kendali langsung dinas, namun sangat memengaruhi dampak penggunaan anggaran.

Keterbatasan akses teknologi dan inovasi juga menjadi hambatan. Pengembangan tanaman pangan dan hortikultura memerlukan penerapan teknologi budidaya yang modern. Namun, tidak semua petani memiliki kemampuan atau akses untuk mengadopsi teknologi tersebut. Anggaran yang dialokasikan untuk pelatihan dan penyuluhan sering kali belum cukup untuk menjangkau seluruh wilayah. Akibatnya, kesenjangan produktivitas antarwilayah masih terjadi.²⁰

Permasalahan kelembagaan kelompok tani juga turut memengaruhi efektivitas pengelolaan APBD. Kelompok tani yang belum kuat secara organisasi sering mengalami kesulitan dalam mengelola bantuan yang diterima. Tanpa manajemen yang baik, bantuan alat atau sarana produksi bisa tidak dimanfaatkan secara optimal. Hal ini mengurangi dampak program yang telah dibiayai melalui APBD.

Selain faktor internal dan eksternal tersebut, tantangan dalam integrasi sistem informasi keuangan juga menjadi kendala. Meskipun pemerintah telah mendorong digitalisasi pengelolaan anggaran, implementasinya memerlukan infrastruktur dan pelatihan yang memadai. Jika sistem belum berjalan optimal, potensi kesalahan input data dan keterlambatan pelaporan dapat terjadi. Secara keseluruhan, faktor penghambat pengelolaan APBD pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah bersifat kompleks dan saling berkaitan. Hambatan internal seperti keterbatasan SDM, budaya organisasi, dan sistem pengawasan berpadu dengan hambatan eksternal

²⁰ Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. *Journal of Marketing*, 49(4).

berupa keterbatasan fiskal, kondisi geografis, bencana alam, dan fluktuasi pasar. Kompleksitas ini menuntut pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam memperbaiki tata kelola anggaran.²¹

Upaya mengatasi hambatan tersebut memerlukan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas aparatur, perbaikan sistem data dan informasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, pengelolaan APBD dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani serta ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Putra (2019), Analisis Pengelolaan APBD dan Dampaknya terhadap Pelayanan Infrastruktur di Kota Bandung, dengan mixed method dan hasil temuan Pengelolaan APBD yang baik meningkatkan pembangunan jalan dan drainase, yang berdampak pada pelayanan publik di sektor atau bidang infrastruktur

E. KESIMPULAN

1. Efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah ditentukan oleh kualitas perencanaan, ketepatan pelaksanaan, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang berjalan secara konsisten. Pengelolaan APBD dapat dikatakan cukup efektif karena alokasi anggaran mampu direalisasikan tepat waktu, tepat sasaran, serta menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan target pembangunan pertanian daerah.

²¹ Sinambela, L. P. 2008. *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*. Bumi Aksara.

2. Faktor penghambat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah yaitu keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, kualitas data yang belum optimal, koordinasi yang belum maksimal, keterbatasan fiskal daerah, ketergantungan pada dana transfer pusat, kondisi geografis yang luas dan beragam, risiko bencana alam, serta fluktuasi harga komoditas pertanian turut memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran.

F. SARAN

Saran operasional untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Perkuat perencanaan berbasis data akurat

Lakukan pemutakhiran data luas lahan, produktivitas, dan kebutuhan petani secara berkala agar alokasi anggaran tepat sasaran dan sesuai potensi wilayah.

2. Optimalkan anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting)

Tetapkan indikator output dan outcome yang terukur (misalnya peningkatan produktivitas/ha atau pendapatan petani) sebagai dasar evaluasi realisasi anggaran.

3. Percepat proses pengadaan dan realisasi kegiatan

Sinkronkan jadwal pengadaan dengan kalender musim tanam agar bantuan benih, pupuk, dan alsintan tidak terlambat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. 2006. *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi analisis multivariete dengan program IBM SPSS 25* (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. 2016. *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah* (Edisi 5). Salemba Empat.
- Handoko, T. H. 2017. *Manajemen* (Edisi 2). BPF.
- Hidayat, M. 2022. Peran pengelolaan keuangan daerah dalam meningkatkan pelayanan pertanian di Kabupaten Brebes. *Jurnal Manajemen Keuangan Daerah*, 4(1).
- Kurniawan, A. 2015. *Transformasi pelayanan publik*. Media Pustaka.
- Lestari, A. 2021. Akuntabilitas pengelolaan APBD dan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Jember. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(3).
- Mahmudi. 2019. *Manajemen kinerja sektor publik*. UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi sektor publik* (Edisi Revisi). Andi Offset. Sumber fundamental tentang keuangan publik dan APBN.
- Moenir, A. S. 2006. *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Musgrave, R. A. 1959. *The theory of public finance: A study in public economy*. McGraw-Hill Book Company.
- Nasution, A. 2021. Analisis efektivitas pengelolaan APBD di organisasi perangkat daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(3).

- Oates, W. E. 1972. *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1985). A conceptual model of service quality and its implications for future research. *Journal of Marketing*, 49(4).
- Putra, D. 2019. Analisis pengelolaan APBD dan dampaknya terhadap pelayanan infrastruktur di Kota Bandung. *Jurnal Kebijakan Publik*, 3(1).
- Rahman, A. 2020. Desentralisasi fiskal dan kualitas pelayanan publik: Studi pada kabupaten di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 9(2).
- Rahmawati, S. 2020. Efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Pertanian. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2).
- Rudin M., BMLF, 2025, Evaluation of Mining Sector Tax Collection Performance . from the Perspective of Regional Fiscal Management *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan* 3 (13), 1891-1900
- Rudin, M, MLF Bakarbesy, 2025, Effectiveness of Additional Employee Income . Policy at the Central Sulawesi Provincial DPRD Secretariat *Jurnal Ilmiah. Manajemen Kesatuan* 13 (5), 3663-3674
- Rudin, M, MLF Bakarbesy, F Fadlun, 2024, Strategi Manajemen Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil Olahan Pangan di Kabupaten Morowali Utara *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo* 10 (1), 186-199
- Sinambela, L. P. 2008. *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*. Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2017. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.